



KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KELURAHAN RAJABASA: STUDI KASUS DI LINGKUNGAN SINGGAH PAI, RT 02 LK 1

Dhea Novitasari¹⁾, Adinda Salsabila Rizki Oktavia²⁾, Lisa Lorensa³⁾, Chaca Alfarica Cahyani⁴⁾, Abdul Halim⁵⁾

¹⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: dheanovitasari525@gmail.com

²⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: adindasalsabilarizkioktavia@gmail.com

³⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: lisalorenza1@gmail.com

⁴⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: chacaalfarika004@gmail.com

⁵⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: abdulhalim@fkip.unila.ac.id

Abstract

Flooding is a hydrometeorological disaster that frequently affects urban areas due to poor drainage systems and unplanned spatial planning. This article examines public policies for flood mitigation in the Singgah Pai neighborhood, Rajabasa Village, Bandar Lampung City. A qualitative descriptive method was used through in-depth interviews with the head of neighborhood association (RT) 02 LK 1, Rajabasa Village. The research results indicate that the flooding problem in the area is caused by an inadequate culvert system and runoff from higher elevations. The community, along with neighborhood association (RT) leaders, have repeatedly proposed widening the drainage system through the sub-district-level Development Planning Forum (Musrenbang). The government's response is beginning to be evident, with plans to widen the drainage by 250 meters this year. This article offers comprehensive, policy-based solutions, ranging from improving drainage infrastructure, empowering communities, to strengthening spatial planning regulations. These findings emphasize the importance of synergy between the government and the community in implementing sustainable flood mitigation policies (Siregar & Ginting, 2023).

Keywords: Flood, Public Policy, Drainage, Musrenbang, Rajabasa.

Abstrak

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang kerap melanda kawasan perkotaan akibat buruknya sistem drainase dan tata kelola ruang yang tidak terencana. Artikel ini mengkaji kebijakan publik dalam penanggulangan banjir di Lingkungan Singgah Pai, Kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan Ketua RT 02 LK 1 Kelurahan Rajabasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan banjir di kawasan tersebut disebabkan oleh sistem gorong-gorong yang tidak memadai dan air kiriman dari wilayah yang lebih tinggi. Masyarakat bersama tokoh RT telah berulang kali mengajukan usulan pelebaran drainase melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Respons pemerintah mulai tampak dengan rencana realisasi pelebaran drainase sepanjang 250 meter pada tahun berjalan. Artikel ini menawarkan solusi komprehensif berbasis kebijakan, mulai dari perbaikan infrastruktur drainase, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan regulasi tata ruang. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir yang berkelanjutan (Siregar & Ginting, 2023).

Kata Kunci: Banjir, Kebijakan Publik, Drainase, Musrenbang, Rajabasa.



LATAR BELAKANG

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi sekarang ini telah menciptakan ruang interaksi yang semakin terbuka untuk antar budaya titik di satu sisi, kondisi ini memberikan sebuah peluang bagi masyarakat untuk bisa mengakses berbagai pengetahuan dan budaya global. Namun di sisi lain arus globalisasi juga mampu menghadirkan tantangan terhadap keberlangsungan budaya lokal, terutama dalam aspek bahasa daerah, tradisi, dan identitas kultural masyarakat. Berbagai kajian telah menunjukkan bahwa adanya modernisasi yang berlangsung secara cepat berpotensi mengurangi penggunaan bahasa daerah dan melemahkan pewarisan budaya antar generasi apabila tidak diimbangi dengan adanya sebuah upaya pelestarian yang sistematis.

Dalam perspektif kebudayaan, bahasa daerah dan wasta tradisional tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi maupun atribut pakaian semata, tetapi juga merepresentasikan sebuah identitas nilai, sejarah, dan kearifan lokal suatu masyarakat daerah di suatu negara (Rahayu, 2022). UNESCO menempatkan tradisi lisan, praktik sosial, serta berbagai ekspresi budaya sebagai bagian dari warisan budaya tak benda yang perlu dijaga keberlangsungannya karena membentuk unsur penting pembentuk identitas suatu komunitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, pelestarian budaya lokal menjadi suatu hal yang penting karena tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya tetapi juga berkaitan dengan penguatan karakter dan identitas masyarakat di tengah derasnya pengaruh budaya global.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga eksistensi budaya daerah, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan instruksi Gubernur Lampung nomor 4 tahun 2025 tentang Hari Kamis Beradat. Kebijakan ini menginstruksikan penggunaan Bahasa Lampung dalam berbagai aktivitas serta pemakaian Batik khas Lampung setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan. Program “Kamis beradat” dirancang sebagai langkah strategis untuk bisa memperkuat pelestarian bahasa daerah dan budaya Lampung melalui pembiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam implementasinya, lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis sebagai agen pewarisan budaya. Sekolah idealnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa sebagai sebuah laboratorium sosial dan budaya yang

nantinya akan mampu menanamkan nilai-nilai lokal kepada peserta didik. Melalui budaya sekolah, proses pembelajaran, dan berbagai kegiatan pendukung, peserta didik dapat ini akan dapat menginternalisasi identitas budaya daerah sehingga akan tumbuh rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya lokalnya. Dengan demikian sekolah menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan kebijakan pelestarian budaya yang dicanangkan oleh pemerintah.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pelestarian budaya lokal di lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan titik lingkungan sekolah perkotaan umumnya dihuni oleh peserta didik dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam serta memiliki tingkat eksposur yang tinggi terhadap budaya populer global. Akibatnya, penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari cenderung menurun, sementara pemaknaan terhadap atribut budaya seringkali hanya dipandang sebagai kewajiban administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya sebuah kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan pelestarian budaya yang telah dibuat dengan praktik implementasinya di lingkungan pendidikan.

Dalam konteks tersebut, SMAN 14 Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi observasi karena memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Sebagai salah satu sekolah menengah atas yang berada di ibukota Provinsi Lampung, sekolah ini memiliki peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan sosial. Dengan adanya heterogenitas tersebut, menjadikan SMAN 14 Bandar Lampung sebagai representasi yang menarik untuk bisa melihat bagaimana kebijakan dari “Kamis Beradat” ini diterapkan di lingkungan pendidikan yang multikultural serta bagaimana peserta didik memaknai dan merespons upaya pelestarian budaya lokal yang diintegrasikan ke dalam aktivitas sekolah dan kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk bisa menganalisis dinamika implementasi program “Kamis Beradat” di SMAN 14 Bandar Lampung sebagai bentuk pelaksanaan instruksi gubernur Lampung nomor 4 tahun 2025. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi bentuk implementasi program, berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya serta adanya alternatif solusi strategis yang dapat ditawarkan guna meningkatkan efektivitas kebijakan pelestarian bahasa dan budaya



Lampung di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktik bagi penguatan kebijakan pelestarian budaya lokal yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Banjir dan Permasalahan Lingkungan Perkotaan

Banjir merupakan salah satu bentuk bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat ketidakmampuan sistem alami maupun buatan dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal. Dalam konteks wilayah perkotaan, banjir tidak hanya dipengaruhi oleh faktor curah hujan yang tinggi, tetapi juga berkaitan erat dengan perubahan tata guna lahan, peningkatan luas permukaan kedap air, berkurangnya daerah resapan, serta kapasitas infrastruktur drainase yang tidak memadai. Perkembangan kawasan perkotaan yang berlangsung cepat sering kali menyebabkan peningkatan limpasan permukaan (run off) sehingga volume air yang masuk ke sistem drainase melebihi kapasitas yang tersedia.

Menurut Wulandari dan Salam (2022), permasalahan banjir di kawasan perkotaan merupakan persoalan kompleks karena dampaknya tidak hanya bersifat fisik berupa kerusakan fasilitas umum dan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak sosial seperti terganggunya aktivitas masyarakat, menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, serta meningkatnya kerentanan kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penanganan banjir membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kebijakan pengelolaan lingkungan.

Infrastruktur Drainase sebagai Upaya Pengendalian Banjir

Drainase perkotaan merupakan salah satu komponen infrastruktur penting dalam pengendalian banjir. Sistem drainase berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air hujan maupun limpasan permukaan menuju tempat pembuangan akhir sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya genangan. Namun, efektivitas sistem drainase sangat bergantung pada kapasitas saluran, kondisi fisik infrastruktur, pola pemeliharaan, serta kesesuaian desain dengan karakteristik wilayah.

Ramadhania dan Indradjati (2023) menjelaskan bahwa banyak permasalahan banjir perkotaan terjadi akibat

ketidaksiesuaian antara perkembangan wilayah dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia. Daerah yang mengalami pertumbuhan permukiman secara cepat sering menghadapi masalah berupa saluran drainase yang sempit, sedimentasi, penyumbatan, serta perubahan fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air.

Pada kawasan Lingkungan Singgah Pai, Kelurahan Rajabasa, kondisi geografis berupa wilayah rendah yang menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari beberapa kawasan sekitar menyebabkan tekanan besar terhadap sistem drainase yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan infrastruktur drainase harus mempertimbangkan karakteristik topografi wilayah dan pola aliran air agar mampu bekerja secara efektif.

Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Banjir

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks pengendalian banjir, kebijakan publik tidak hanya berupa pembangunan fisik seperti perbaikan drainase, tetapi juga mencakup proses perencanaan, penganggaran, koordinasi antarinstansi, serta pelibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.

Siregar dan Ginting (2023) menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi di lapangan. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik dapat mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh koordinasi yang efektif, sumber daya yang memadai, serta respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan banjir membutuhkan kebijakan yang bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan serta permasalahan lokal.

Dalam kasus banjir di Kelurahan Rajabasa, proses pengajuan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) menjadi salah satu bentuk mekanisme kebijakan publik yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan program pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan banjir tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dapat muncul melalui proses komunikasi dan aspirasi masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik



Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam keberhasilan pembangunan, terutama dalam penyelesaian permasalahan lingkungan seperti banjir. Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk penyampaian aspirasi, pengawasan pembangunan, pemeliharaan fasilitas umum, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Rosyidah dkk. (2024), partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik menciptakan hubungan dua arah antara pemerintah dan warga. Pemerintah memperoleh informasi mengenai kondisi nyata di lapangan, sedangkan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang mereka alami. Hubungan tersebut dapat meningkatkan efektivitas kebijakan karena program yang dibuat lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Dalam konteks Lingkungan Singgah Pai, keterlibatan warga melalui Ketua RT dalam menyampaikan usulan perbaikan drainase menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian masalah secara kolektif. Respons pemerintah melalui observasi lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan dapat berjalan ketika terdapat komunikasi antara masyarakat sebagai penerima manfaat dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.

Pendekatan Kualitatif dalam Kajian Kebijakan Publik

Penelitian mengenai implementasi kebijakan publik sering menggunakan pendekatan kualitatif karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara lebih mendalam. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman, persepsi, serta proses interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan.

Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Melalui metode wawancara dan observasi lapangan, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana suatu kebijakan dirasakan, diterapkan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Dalam penelitian mengenai banjir di Lingkungan Singgah Pai Kelurahan Rajabasa, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami proses pengajuan aspirasi masyarakat, respons pemerintah, serta hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan infrastruktur drainase. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara

permasalahan lingkungan, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam permasalahan banjir serta implementasi kebijakan publik dalam penanganannya di Lingkungan Singgah Pai, RT 02 LK 1, Kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, pengalaman, dan perspektif masyarakat serta pemerintah dalam menghadapi permasalahan banjir, bukan hanya mengukur fenomena berdasarkan data kuantitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali informasi mengenai penyebab banjir, proses penyampaian aspirasi masyarakat, serta respons pemerintah terhadap kebutuhan perbaikan infrastruktur drainase.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu kawasan Lingkungan Singgah Pai, RT 02 LK 1, Kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung yang memiliki permasalahan banjir berulang. Pemilihan lokasi didasarkan pada kondisi wilayah yang merupakan daerah rendah dan menjadi titik berkumpulnya aliran air dari beberapa kawasan sekitar seperti Rajabasa Permai Atas dan Haji Mena. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini relevan untuk dikaji dalam perspektif kebijakan publik, khususnya terkait pengelolaan infrastruktur drainase dan efektivitas program pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir perkotaan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki informasi terkait permasalahan banjir, terutama Ketua RT setempat sebagai representasi masyarakat yang mengetahui kondisi lingkungan serta proses pengajuan usulan kepada pemerintah. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi drainase, pola aliran air, serta faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya banjir. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, foto kondisi wilayah, serta dokumen terkait proses pengajuan pembangunan atau perbaikan infrastruktur.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih dan



menyusun informasi penting hasil wawancara serta observasi yang berkaitan dengan permasalahan banjir dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara kondisi lapangan, aspirasi masyarakat, dan respons pemerintah. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian mengenai efektivitas implementasi kebijakan penanganan banjir.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Triangulasi dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara masyarakat dengan hasil observasi kondisi lapangan serta informasi terkait respons pemerintah terhadap permasalahan banjir. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai permasalahan banjir di Lingkungan Singgah Pai serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengelolaan drainase perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Banjir di Lingkungan Singgah Pai Kelurahan Rajabasa

Lingkungan Singgah Pai di Kelurahan Rajabasa merupakan kawasan yang secara topografis berada di dataran rendah. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah tersebut sebagai titik akumulasi aliran air dari berbagai kawasan di sekitarnya yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Imas Widianingsih selaku Ketua RT 02 LK 1, banjir yang terjadi di kawasan ini bukanlah banjir lokal semata, melainkan merupakan dampak dari air kiriman yang berasal dari wilayah Rajabasa Permai Atas dan Haji Mena

Pemicu utama banjir di kawasan ini adalah buruknya sistem gorong-gorong yang dibangun tanpa perencanaan yang matang. Gorong-gorong yang ada hanya diletakkan begitu saja tanpa konstruksi yang memastikan air dapat mengalir secara optimal menuju muara. Akibatnya, air yang seharusnya mengalir melalui saluran drainase justru meluap dan menggenangi permukiman warga. Kondisi ini sesuai dengan kajian Nugroho dan Handayani (2021) yang menyatakan bahwa sistem drainase perkotaan yang tidak terencana dengan baik merupakan faktor utama penyebab banjir di kawasan urban (Nugroho & Handayani, 2021).

Dampak banjir yang terjadi tidak hanya sebatas kerugian material berupa kerusakan properti dan jalan, tetapi juga telah merenggut korban jiwa. Seorang anak dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus banjir, dan kejadian ini sempat viral di media sosial. Insiden tragis ini menggarisbawahi betapa seriusnya ancaman banjir bagi keselamatan warga dan mendesak perlunya penanganan yang segera dan terstruktur dari pemerintah (Helmi & Muthohharoh, 2024).

Proses Pengajuan Kebijakan oleh Masyarakat

Masyarakat Lingkungan Singgah Pai tidak berdiam diri menghadapi persoalan banjir yang terus berulang. Melalui inisiasi Ketua RT, mereka secara aktif memperjuangkan perbaikan kondisi lingkungan melalui mekanisme yang tersedia, yakni forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Forum ini merupakan instrumen kebijakan partisipatif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah (Fakhira & Salam, 2023).

Usulan yang diajukan berfokus pada pelebaran drainase sepanjang kurang lebih 250 meter dengan dimensi tinggi 1 meter dan lebar 1 meter. Usulan ini dilatarbelakangi oleh kapasitas saluran drainase yang ada saat ini sangat tidak memadai untuk menampung volume air yang masuk dari berbagai arah. Proses pengajuan ini telah berlangsung berkali-kali, mencerminkan kegigihan masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang aman dan bebas banjir.

Percepatan respons pemerintah juga didorong oleh tekanan dari media sosial. Seorang warga yang frustrasi dengan kondisi yang tidak kunjung membaik mengunggah video banjir di Instagram, yang kemudian menarik perhatian Wali Kota Bandar Lampung. Fenomena ini menggambarkan bagaimana media sosial kini berfungsi sebagai kanal advokasi kebijakan yang efektif, melengkapi mekanisme formal seperti Musrenbang (Rofiyanti dkk., 2022).

Respons Pemerintah terhadap Permasalahan Banjir

Respons pemerintah terhadap permasalahan banjir di Lingkungan Singgah Pai mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung telah turun ke lapangan untuk melakukan observasi langsung terhadap kondisi drainase. Hasil observasi tersebut mengonfirmasi bahwa



permasalahan utama memang berasal dari air kiriman dan sistem gorong-gorong yang tidak berfungsi optimal.

Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah adalah meminta persetujuan warga terdampak sebelum pelaksanaan pelebaran drainase, mengingat proyek tersebut akan bersinggungan dengan lahan milik warga. Mekanisme persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menimbulkan konflik baru di masyarakat dan sesuai dengan prinsip *good governance* yang mengutamakan transparansi dan partisipasi publik (Maranjaya, 2022).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, realisasi pelebaran drainase dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Meskipun demikian, masyarakat tetap berada dalam ketidakpastian karena belum ada kepastian jadwal yang konkret. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan, implementasinya masih memerlukan pengawalan yang ketat dari masyarakat agar tidak mengalami penundaan yang tidak perlu (Siregar & Ginting, 2023).

Analisis Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Banjir

Dari perspektif kebijakan publik, penanganan banjir di Lingkungan Singgah Pai mencerminkan siklus kebijakan yang berjalan secara bertahap. Dimulai dari identifikasi masalah oleh masyarakat, kemudian formulasi kebijakan melalui Musrenbang, dilanjutkan dengan evaluasi oleh dinas teknis, hingga tahap implementasi yang sedang berjalan. Siklus ini menggambarkan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang dinamis dan memerlukan keterlibatan berbagai aktor (Rosyidah dkk., 2024).

Permasalahan banjir di kawasan ini juga memperlihatkan adanya kegagalan koordinasi lintas sektoral. Pembangunan gorong-gorong yang dilakukan tanpa perencanaan terpadu menyebabkan air tidak teralirkan dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, dan pemerintah kelurahan dalam merencanakan dan mengawasi pembangunan infrastruktur perkotaan (Wulandari & Salam, 2022).

Keberhasilan relatif dari perjuangan masyarakat ini juga membuktikan pentingnya partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan. Tanpa keberanian warga untuk bersuara, baik melalui Musrenbang maupun media sosial, kemungkinan besar permasalahan ini akan terus diabaikan. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi

deliberatif yang menekankan pentingnya ruang publik bagi warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Fakhira & Salam, 2023).

Perbaikan Infrastruktur Drainase

Solusi jangka pendek yang paling mendesak adalah segera merealisasikan pelebaran drainase sepanjang 250 meter sebagaimana yang telah diusulkan. Dimensi drainase yang direncanakan dengan tinggi dan lebar masing-masing 1 meter perlu dikaji ulang oleh ahli teknik sipil untuk memastikan kapasitasnya cukup menampung debit air maksimum dari seluruh kawasan tangkapan (Nugroho & Handayani, 2021).

Selain pelebaran drainase, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem gorong-gorong yang ada. Gorong-gorong harus dibangun dengan desain hidraulik yang tepat, dilengkapi dengan saluran pembuangan yang terintegrasi, dan diarahkan secara terencana menuju muara yang tepat. Pemeliharaan rutin juga harus dijadwalkan secara berkala untuk mencegah pendangkalan akibat sedimentasi (Ramadhania & Indradjati, 2023).

Penguatan Regulasi dan Tata Ruang

Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu memperkuat regulasi tata ruang untuk mencegah pembangunan yang tidak terkendali di kawasan hulu yang berkontribusi pada peningkatan debit air di kawasan Rajabasa. Penerapan aturan koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau (KDH) yang ketat di kawasan hulu dapat membantu mereduksi limpasan permukaan (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021).

Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Drainase Perkotaan juga harus diperketat. Setiap pembangunan, baik perumahan maupun komersial, wajib memiliki sistem pengelolaan air hujan mandiri sebelum diizinkan beroperasi. Hal ini akan mengurangi beban drainase eksisting dan mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007).

Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase. Perilaku membuang sampah sembarangan di saluran air berkontribusi signifikan terhadap pendangkalan dan penyumbatan drainase. Program kerja



bakti rutin yang terstruktur dan didukung oleh pemerintah kelurahan dapat menjadi solusi yang efektif (Hafrida dkk., 2023).

Pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang teknik konservasi air berbasis rumah tangga, seperti pembuatan biopori, sumur resapan, dan penampungan air hujan. Program-program ini tidak hanya mengurangi risiko banjir, tetapi juga berkontribusi pada ketersediaan air bersih dan ketahanan lingkungan secara keseluruhan (Mundra dkk., 2022).

Penguatan Sistem Peringatan Dini

Mengingat banjir di kawasan ini telah menelan korban jiwa, pemerintah perlu segera membangun sistem peringatan dini banjir yang terintegrasi. Sistem ini dapat memanfaatkan teknologi sederhana seperti sensor tinggi muka air yang terhubung dengan sistem notifikasi berbasis pesan singkat atau aplikasi untuk memberikan peringatan dini kepada warga sebelum banjir terjadi (Hambali dkk., 2022).

Pelatihan mitigasi bencana bagi tokoh masyarakat dan warga juga perlu diintensifkan. Warga yang terlatih akan lebih siap dalam menghadapi situasi darurat banjir, sehingga dapat meminimalisasi risiko korban jiwa. Program ini perlu dilaksanakan secara berkala dan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung (Helmi & Muthohharoh, 2024).

KESIMPULAN

Permasalahan banjir di Lingkungan Singgah Pai, Kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung merupakan persoalan kebijakan publik yang kompleks dan multidimensi. Akar permasalahannya terletak pada buruknya sistem gorong-gorong dan drainase yang tidak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah sekitarnya. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan (Wulandari & Salam, 2022).

Masyarakat, melalui kepemimpinan Ketua RT, telah menunjukkan keberanian dan kegigihan dalam memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang aman melalui mekanisme Musrenbang. Respons pemerintah, meskipun terlambat, mulai menunjukkan arah yang positif dengan direncanakannya pelebaran drainase pada tahun berjalan. Proses ini memberikan pelajaran berharga tentang

pentingnya sinergi antara aspirasi masyarakat dan respons kebijakan pemerintah (Siregar & Ginting, 2023).

Penyelesaian permasalahan banjir di kawasan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi perbaikan infrastruktur drainase, penguatan regulasi tata ruang, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sistem peringatan dini bencana. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan dapat segera merealisasikan program-program tersebut dengan menjadikan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan (Rosyidah dkk., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Pentahelix*, 1(2), 143–154. <https://doi.org/10.24853/penta.1.2.143-154>
- Hafrida, L., Hildawati, H., Sari, Y., Yanti, M., & Afrizal, D. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 507–527. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.16962>
- Hambali, H., Akbar, A., & Yani, A. (2022). Early Warning System for Flood in Gunungsari District Based on IoT with Telegram Bot as a Warning Message Sender. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 18(2), 173–178. <https://doi.org/10.33480/pilar.v18i2.3711>
- Helmi, A., & Muthohharoh, N. H. (2024). Sistem Peringatan Dini berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana: Studi di Tiga Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 48–64. <https://doi.org/10.33007/ska.v14i1.3302>
- Maranjaya, I. (2022). Good Governance dan Kinerja Pemerintahan di Era Transparansi Informasi Publik. *Jurnal Governance Innovation*, 4(1), 1–12.
- Mundra, W., Wulandari, L. K., & Ahmadi, S. (2022). Pengendalian Banjir Melalui Sumur Resapan. *Prosiding SEMSINA*, 3(1). <https://doi.org/10.36040/semsina.v3i1.4871>
- Nugroho, D. A., & Handayani, W. (2021). Kajian Faktor Penyebab Banjir dalam Perspektif Wilayah Sungai: Pembelajaran dari Sub Sistem Drainase Sungai Beringin. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*,



- 17(2). <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.33912>
- Ramadhania, I. S., & Indradjati, P. N. (2023). Prinsip Penerapan Water Sensitive Urban Design pada Kawasan Perkotaan (Kasus Studi: Kecamatan Subang, Kabupaten Subang). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(4), 579–594. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i4.46134>
- Rofiyanti, E., Agustina, D., & Firzah, M. (2022). Analisis Peran Media Sosial sebagai Platform Komunikasi dan Penyebaran Informasi Kebencanaan di DKI Jakarta. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 155–168. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3366>
- Rosyidah, N., Putri, M. W., & Rahmad, D. (2024). Analisis Kebijakan Publik Penanganan Banjir di Surabaya Barat. *Jurnal Dinamika Kebijakan Publik*, 9(1), 12–22. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/8784>
- Siregar, T., & Ginting, S. (2023). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(2), 137–146. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i2.618>
- Wulandari, S. D., & Salam, R. (2022). Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang Selatan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 534–548. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2760>